**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Pada mulanya, studi hubungan international muncul sebagai akibat dari gencarnya perang yang terjadi pada masa itu, para negarawan berkeinginan untuk memahami penyebab terjadinya konflik dan berusaha untuk menciptakan perdamaian dunia.[[1]](#footnote-1) Hubungan Internasional sebagai sebuah disiplin ilmu bersifat kontemporer dan terus mengalami perkembangan setiap waktu. Hubungan internasional tidak lagi hanya mengurusi tentang perang dan damai saja, melainkan terus berintegrasi dengan disiplin ilmu lainnya seperti, politik, ekonomi, lingkungan dan sosial.

Konsep keamanan merupakan salah satu pendekatan dalam mengkaji hubungan internasional yang lebih baik, mendalam dan berguna dibanding dengan konsep kekuatan dan perdamaian. Konsep keamanan ini dapat dilihat sebagai pengaruh dari masing-masing posisi ekstrem antara kekuatan dan perdamaian.[[2]](#footnote-2) Analisis keamanan memerlukan suatu cara pandang yang menempatkan negara dan sistem ke dalam sebuah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Dimana negara sebagian

terbentuk dengan sendirinya dan sebagian lain dibentuk oleh lingkungan anarki yang kompetitif dan sengit. Lingkungan domestik dan dinamika internasional, keduanya merupakan hal yang paling penting bagi analisis keamanan karena merupakan hubungan yang kompleks di antara keduanya.[[3]](#footnote-3)

Menurut **Barry Buzan** dalam bukunya yang berjudul *People State and Fear: The National Security Problem in International Relations*, bahwa keamanan yang dimaksud di dalam pendekatan ini tidak sebatas pada keamanan saja, tetapi mencakup keamanan militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan,[[4]](#footnote-4) seperti yang dipaparkan di bawah ini:

1. Keamanan militer, mencakup interaksi antar dua tingkat dan kekuatan yaitu kemampuan defensif dan persepsi militer mengenai intensi masing-masing pihak.
2. Keamanan politik, mencakup kesinambungan dan stabilitas organisasi suatu negara atau sistem pemerintahan serta ideologi yang melegitimasi kedua hal tadi.
3. Keamanan ekonomi, mencakup akses pada sumber daya finansial maupun pasar yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara.
4. Keamanan sosial, mencakup kemampuan untuk mempertahankan dan menghasilkan pola-pola tradisional dalam bidang bahasa, kultur, agama, dan identitas nasional.
5. Keamanan lingkungan, mencakup pemeliharaan lingkungan lokal sebagai pendukung utama kelangsungan hidup manusianya.

Meskipun masing-masing sektor tersebut mempunyai titik-titik vokal dalam kerangka masalah-masalah keamanan, dan merumuskan cara-cara sendiri dalam menentukan prioritas kebijakan utama suatu negara, namun faktor-faktor itu sendiri saling terkait dalam operasinya.[[5]](#footnote-5)

Aspek lingkungan hidup yang pemahamannya berakar dari disiplin ilmu alam hayati yang menjadi isu internasional pada dekade belakangan ini kerap diangkat dalam berbagai forum dan kajian kerjasama internasional. Isu lingkungan hidup menjadi salah satu kajian yang dapat diklasifikasikan dalam kajian yang keberadaannya dapat mendorong aktor atau unit internasional lain untuk ikut terlibat dalam penyelesaian dan penanganannya, hal ini dikarenakan masalah lingkungan dianggap bersifat implikatif yang menimbulkan *chain reaction* atau reaksi berantai terhadap pihak lain, begitu penting dan tingginya tingkat urgensi masalah lingkungan hidup hingga mendorong banyak pihak untuk mengangkat dan menjadikannya sebagai komoditas isu hangat dalam setiap pertemuan forum internasional.

Menurut **Greene**, ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa isu lingkungan ini menjadi salah satu fokus penting dalam hubungan internasional. Seperti halnya berikut:

1. Beberapa masalah lingkungan hidup sudah menjadi permasalahan global. Seperti emisi gas yang menyebabkan perubahan iklim di seluruh dunia.
2. Beberapa masalah lingkungan berhubungan dengan eksploitasi sumber daya yang dimiliki bersama. Misal, jika pembuangan limbah dilakukan di laut perbatasan dua negara tentu dampaknya juga akan mengenai kedua negara tersebut.
3. Banyak masalah lingkungan yang sifatnya transnasional dan tak terikat oleh batas wilayah.
4. Meskipun permasalahnnya hanya tingkat lokal, namun dialami lintas negara.
5. Permasalah lingkungan berkaitan juga dengan ekonomi-sosial maupun politik.[[6]](#footnote-6)

Kemudian dari berbagai pertemuan antar negara yang membahas masalah lingkungan hidup yang dalam perkembangannya semakin menunjukkan betapa tingginya tingkat interdependensi antar negara dalam penanganan isu ini. Dimana isu lingkungan hidup menjadi salah satu masalah vital dari kajian kerjasama kontemporer dalam hubungan antar negara saat ini, hubungan kerjasama antar negara dalam isu ini lebih didasarkan pada kepentingan bersama oleh masing-masing pihak atau negara dalam mengatasai serta menanggulangi persoalan lingkungan hidup, yang dampak eksesnya jika terus dibiarkan dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan global, yang tentunya, efek buruk dari perubahan lingkungan global ini akan dirasakan dan merugikan semua pihak atau negara. Selain mempengaruhi lingkungan, dampak krusial lainnya yang akan turut mengikuti layaknya efek domino adalah berimbasnya kepada kekacauan dalam tatanan ekonomi, sosial, politik global. Sehingga kemudian masalah lingkungan hidup ini oleh hampir semua pihak dan negara dianggap sebagai masalah bersama yang perlu kerjasama tingkat tinggi secara multilateral dan *multitrack* dalam penanganannya, atau dengan kata lain, interdependensi yang tinggi oleh setiap negara dalam masalah ini menjadi landasan mengenai kenapa isu ini dibahas dan diangkat dengan begitu intens di berbagai forum dan kajian, baik secara formal maupun informal.

Pemanasan global, degradasi lingkungan hidup, kelangkaan flora-fauna dan perubahan iklim pada awalnya merupakan contoh-contoh permasalahan yang terkait dengan lingkungan hidup. Perkembangan ilmu hubungan internasional yang *state centric* dan berorientasi pada isu *high politic* semasa perang dingin membuat isu yang terkait dengan lingkungan hidup terabaikan. Selain itu, perkembangan ekonomi yang masif, proliferasi penggunaan teknologi baru, dan peningkatan jumlah populasi mengakibatkan peningkatan penggunaan energi dan sumber daya alam.[[7]](#footnote-7) Dinamika ini kemudian mempengaruhi keberlangsungan lingkungan hidup. Dampak pencemaran lingkungan hidup tidak hanya bersifat lokal namun juga mempunyai dampak global seperti adanya *global warming*. Merespon hal ini, komunitas internasional sadar bahwa permasalahan lingkungan hidup bukanlah suatu permasalahan lokal semata tetapi haruslah diselesaikan secara bersama.[[8]](#footnote-8)

Dengan adanya sebuah pernyataan bahwa sekarang dan yang akan datang bencana yang terjadi di dunia sebagian besar adalah bencana hidrometeorologi.[[9]](#footnote-9) Hidrometeorologi adalah bencana alam yang berhubungan dengan iklim, yang meliputi: banjir, longsor, puting beliung, kekeringan, hingga gelombang pasang. Bencana ini menjadi ancaman bagi negara-negara di dunia khususnya di Indonesia. Bencana ini dipicu oleh kerusakan alam dan pemanasan global.

**“...menurut laporan Global Humanitarian Forum (The Anatomy of Silent Crisis, 2009), bencana hidrometeorologi akan menjadi ancaman terbesar manusia pada tahun-tahun mendatang, karena saat pemanasan global yang berdampak pada mencairnya es di kutub, suhu di pegunungan salju menghangat, dan negara-negara di dunia khusunya Asia termasuk di Indonesia semakin terancam oleh bencana hidrometeorologi...”[[10]](#footnote-10)**

*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA), dalam laporannya menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang rentan bencana terkait iklim.[[11]](#footnote-11) Hal senada disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), yang merilis hasil kajian risiko bencana di Indonesia menunjukkan; 84% wilayah di Indonesia merupakan wilayah rawan bencana. Dari jumlah tersebut, 98% nya merupakan ancaman bencana ekologis yang terkait erat dengan kerusakan lingkungan, termasuk perubahan iklim.[[12]](#footnote-12)

Implikasi fenomena-fenomena cuaca dan iklim saat ini sudah menjadi momok bagi banyak negara, termasuk Indonesia.[[13]](#footnote-13) Sehingga kesadaran akan kebutuhan mengenai pelayanan informasi cuaca dan iklim adalah suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Selain kebutuhan penyediaan layanan informasi, hal yang sangat krusial adalah dibutuhkannya pengurangan risiko bencana.

Kesadaran untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana pada lingkup internasional merupakan tonggak awal sekaligus landasan bagi pelaksanaan upaya sejenis pada lingkup yang lebih kecil. Di tingkat internasional upaya pengurangan risiko bencana dipelopori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui beberapa resolusi yang menyerukan kepada dunia untuk lebih memprioritaskan upaya pengurangan risiko bencana sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan berkelanjutan.[[14]](#footnote-14)

Kesadaran akan pengurangan risiko bencana inilah yang melatarbelakangi PBB dalam pembentukan organisasi internasional yang khusus memberikan pelayanan meteorologi, hidrologi dan geofisika. Pada tahun 1950 telah dibentuk *World Meteorological Organization* (WMO) di bawah naungan PBB. Dalam perkembangannya, WMO tidak hanya terbatas pada kegiatan observasi dan pertukaran data, tetapi diperluas cakupannya seperti pengembangan SDM, Litbang, dan pencegahan bencana alam yang disebabkan oleh meteorologi (cuaca dan iklim), hidrologi dan geofisika.[[15]](#footnote-15)

Pendirian WMO didasarkan karena adanya kebutuhan untuk pembangunan berkelanjutan, pengurangan kerugian jiwa dan properti yang disebabkan oleh bencana alam dan bencana lainnya, kegiatan yang terkait dengan meteorologi serta untuk menjaga lingkungan dan iklim global untuk generasi manusia sekarang dan masa depan.[[16]](#footnote-16)

Pembentukan WMO ini diperkuat dengan adanya Resolusi PBB. Majelis Umum PBB akhirnya menjawab perubahan iklim untuk pertama kali dengan mengadopsi resolusi 43/53. Resolusi ini paling tidak menghadirkan dua aspek penting yang akan menjadi perdebatan dalam perundingan-perundingan berikutnya. Pertama, mengakui bahwa perubahan iklim merupakan masalah bersama umat manusia terutama karena iklim merupakan kondisi yang esensial yang mempertahankan kehidupan di muka bumi. Kedua, menentukan bahwa tindakan yang perlu dan dalam jangka waktu yang tepat seharusnya diambil dalam kerangka kerja global untuk menghadapi perubahan iklim.[[17]](#footnote-17)

Perhatian PBB terhadap masalah pengurangan risiko bencana dimulai dengan dikeluarkannya resolusi dalam sidang Majelis Umum ke-2018 mengenai Bantuan dalam Situasi Bencana Alam dan Bencana Lainnya pada tanggal 14 Desember 1971. Resolusi ini kemudian ditindaklanjuti dengan resolusi nomor 46/182 tahun 1999 mengenai Penguatan Koordinasi Bantuan Kemanusiaan PBB dalam Hal Bencana.[[18]](#footnote-18)

Pada tanggal 30 Juli 1999, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengeluarkan resolusi nomor 63 tahun 1999 tentang Dekade Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Dalam resolusi ini Dewan Ekonomi dan Sosial mengharapkan agar PBB memfokuskan tindakan kepada pelaksanaan strategi internasional untuk pengurangan risiko bencana (*International Strategy for Disaster Reduction*/ISDR). Strategi ini merupakan landasan dari kegiatan-kegiatan PBB dalam pengurangan risiko bencana yang sekaligus memberikan arahan kelembagaan melalui pembentukan kelompok kerja lintas instansi-lembaga-organisasi.[[19]](#footnote-19) Dalam hal ini seperti organisasi WMO yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana mencakup kegiatan-kegiatan jangka menengah sampai jangka panjang yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut **T. May Rudy**

**“...organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada dasar negara yang berbeda...”[[20]](#footnote-20)**

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan informasi cuaca dan iklim semakin meningkat, yaitu mengikuti perkembangan pelayanan informasi cuaca dan iklim dunia. Sehingga adanya keharusan bagi Indonesia untuk dapat pula menyetarakan kualitas pelayanan informasi sesuai dengan standar internasional.[[21]](#footnote-21)

Indonesia pun merupakan salah satu penggerak dalam perubahan meteorologi dunia dan regional ASEAN. Di Indonesia fungsi dan wewenang kebijakan meteorologi dipegang oleh institusi resmi yang bernama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).[[22]](#footnote-22)

Pada tanggal 1 Oktober 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.[[23]](#footnote-23) BMKG mempunyai status sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK), yang dipimpin oleh seorang kepala badan, BMKG memiliki tugas; melaksanakan tugas pemerintah dibidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[[24]](#footnote-24)

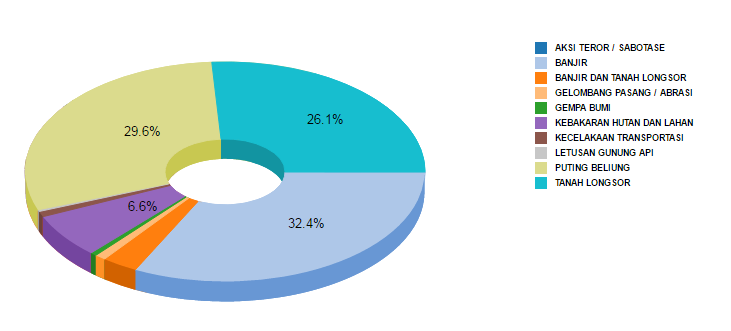
Pada tahun 1950, Indonesia yang diwakili oleh BMKG resmi tergabung dalam keanggotaannya terhadap WMO. Keanggotaan Indonesia pada WMO ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 mengenai Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).[[25]](#footnote-25)

Indonesia pun cukup berperan dalam organisasi WMO. Dari 190 negara seluruh dunia yang duduk bersama, Indonesia berada pada posisi yang cukup tinggi, yaitu menjadi presiden dari 23 negara di dunia. Setidaknya ada 6 wilayah di dunia yang terbagi di antaranya Afrika, Asia Pasifik, Amerika Serikat, Amerika bagian Selatan dan Pasifik Barat. Indonesia kini menjadi *President* RA V (*WMO Regional Association*) atau presiden untuk 23 negara selama dua periode berturut-turut, yaitu pada periode 2010-2014 dan 2014-2018. Tentu ini merupakan pengakuan sekaligus kepercayaan internasional kepada Indonesia.[[26]](#footnote-26)

Keanggotaan Indonesia pada WMO tidak sebatas dalam hal pertukaran data dan informasi, tetapi meliputi pengurangan risiko bencana di Indonesia yang salah satunya adalah bencana banjir.[[27]](#footnote-27) Dalam hal ini, banjir merupakan bencana yang selalu terjadi setiap tahun di Indonesia terutama pada musim hujan. Berdasarkan kondisi morfologinya, bencana banjir disebabkan oleh relief bentang alam Indonesia yang sangat bervariasi dan banyak sungai yang mengalir di antaranya. Banjir pada umumnya terjadi di wilayah Indonesia bagian barat yang menerima curah hujan lebih banyak dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian timur. Populasi penduduk Indonesia yang semakin padat yang dengan sendirinya membutuhkan ruang yang memadai untuk kegiatan penunjang hidup yang semakin meningkat secara tidak langsung merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya banjir. Penebangan hutan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan peningkatan aliran air permukaan yang tinggi dan tidak terkendali sehingga terjadi kerusakan lingkungan di daerah satuan wilayah sungai. Penebangan hutan juga menyebabkan peningkatan aliran air (*run off*) yang dapat menyebabkan banjir bandang.[[28]](#footnote-28)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat banjir mendominasi data bencana yang paling sering terjadi secara nasional sejak tahun 2000-2016. “Secara nasional, 77 persen bencana yang terjadi merupakan bencana hidrometeorologi, yaitu bencana banjir, angin puting beliung dan longsor” kata Kabid Data pada Pusat Informasi dan Humas BNPB, Dr. Agus Wibowo.[[29]](#footnote-29)

“Secara presentase, banjir mencapai 33 persen, angin puting beliung 30 persen dan tanah longsor menjapai 27 persen. Itu data sejak tahun 2000-2016” tambahnya.[[30]](#footnote-30)



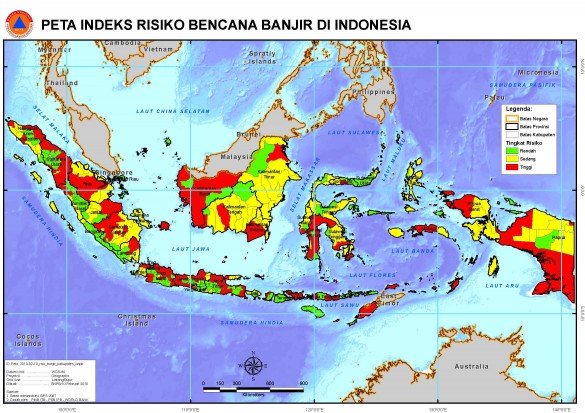
**Gambar 1.1 Presentase Bencana di Indonesia Tahun 2000-2016**

Dapat dilihat dari presentase bencana di atas, bahwa banjir masih menjadi salah satu bencana alam terbesar di Indonesia. Dengan melihat semakin bertambahnya bencana banjir dari tahun ke tahun yang akhirnya melatarbelakangi pembentukan pengurangan risiko bencana banjir di Indonesia yang salah satu upayanya adalah pembentukan sistem peringatan dini oleh BMKG dan WMO.

BMKG menjadi tuan rumah pertemuan ahli meteorologi dan hidrologi yakni *Initial Planning Meeting for Southeastern Asia-Oceania Flash Flood Guidance* (SAOFFG) dalam rangka membahas rencana pembentukan pusat regional peringatan dini banjir bandang.[[31]](#footnote-31)

*Project* yang merupakan hasil kerjasama antara WMO, HRC, NOAA, USAID dan BMKG bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengurangan kerentanan wilayah terhadap bahaya hidrometeorologi, khususnya banjir, dengan mengembangkan dan menerapkan sistem bimbingan banjir melalui peningkatan kapasitas regional dan nasional dengan sistem peringatan dini yang tepat dan akurat.[[32]](#footnote-32)

Selain pembentukan SAOFFG, BMKG dan WMO juga membentuk program *Coastal Inundation Forecasting Demonstration Project – Indonesia* (CIFDP-I) yang merupakan satu proyek percontohan dibawah payung WMO yang bertujuan untuk membantu Indonesia men-*setup* sistem peringatan dini banjir rob.[[33]](#footnote-33)



**Gambar 2.1 Daerah Bahaya Banjir di Indonesia**

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai keanggotaan Indonesia pada WMO dalam bentuk skripsi, yang berjudul : **“KERJASAMA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG) DAN WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION (WMO) KAITANNYA DENGAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA BANJIR DI INDONESIA”.**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana politik luar negeri Indonesia mengenai isu lingkungan hidup kaitannya terhadap kerjasama dengan WMO?
2. Bagaimana upaya WMO dalam mengurangi risiko bencana dan keuntungan bagi negara anggotanya termasuk Indonesia?
3. Bagaimana usaha dan dampak nyata dari kerjasama BMKG dan WMO dalam hal pengurangan risiko bencana banjir yang terjadi di Indonesia?
4. **Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian pada penjelasan mengenai kerjasama BMKG dan WMO dalam isu lingkungan hidup terutama dalam hal pengurangan risiko bencana banjir.

1. **Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang, banyak hal yang dapat digali lebih dalam. Mengingat sempitnya waktu penelitian dan agar dalam penulisan ini tidak melebar dan fokus pada pembahasan, maka penulis akan menarik *research question* sebagai berikut:

**“Bagaimana kerjasama BMKG dan WMO dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir yang terjadi di Indonesia”**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan dari penelitian ini adalah:**
3. Untuk mendeskripsikan mengenai politik luar negeri Indonesia mengenai isu lingkungan hidup dalam kerjasamanya dengan WMO.
4. Untuk mendeskripsikan mengenai upaya WMO dalam mengurangi risiko bencana dan keuntungan bagi negara anggotanya termasuk Indonesia.
5. Untuk mendeskripsikan mengenai usaha serta dampak nyata dari kerjasama Indonesia dan WMO dalam hal pengurangan risiko bencana yang terjadi di Indonesia.

1. **Kegunaan dari penelitian ini adalah:**
2. Menambah referensi dan kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional tentang kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional WMO mengenai pengurangan risiko bencana banjir di Indonesia
3. Menjadi pedoman bagi pembaca untuk memahami proses-proses maupun kepentingan nasional suatu negara dalam keanggotaannya pada organisasi internasional serta mengetahui bagaimana keadaan lingkungan hidup sekitar kita.
4. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
5. **Kerangka Teoritik**

Untuk mempermudah proses penelitian ini, diperlukan adanya konsep landasan berpijak untuk menguatkan analisa. Sebelum mengemukakan konsep-konsep yang membahas pokok-pokok teoritis yang sesuai dengan tema penelitian ini, adalah suatu keharusan di suatu penelitian untuk menggunakan pendekatan ilmiah kerangka konseptual dalam mengarahkan penelitian yang dimaksud, agar dapat membantu penulis dalam memahami perbedaan yang besar tentang data dan peristiwa dalam hubungan internasional.

Kerangka teoritis ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa permasalahan, yang akan ditopang oleh pendapat para pakar hubungan internasional, diharapkan hasilnya tidak jauh dari sifat yang ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis.

Dalam mengangkat fenomena-fenomena yang ada dan terjadi dalam hubungan internasional, penulis akan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai penopang dalam membentuk penelitian. Untuk mencoba menemukan jawaban atas rumusan masalah, sebelumnya penulis akan menguraikan kerangka teoritis yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini.

Seperti yang dikemukakan oleh **K.J. Holsti**, menunjukkan bahwa hubungan internasional meliputi interaksi antara pemerintah (*state actor*) maupun warga negara (*non state actor*) dalam sistem internasional sebagai berikut:

**“Hubungan internasional berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh warga negara. Pengkajian hubungan internasional, termasuk pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional dan meliputi segala hubungan diantara berbagai negara meliputi dunia kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.”[[34]](#footnote-34)**

Sejak semula, fokus dari teori hubungan internasional adalah mempelajari tentang penyebab-penyebab dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama. Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan.[[35]](#footnote-35)

**“Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor-aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi nasional dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi-regulasi, norma-norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional.”[[36]](#footnote-36)**

Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerja sama. Sehingga isu utama dari teori kerjasama adalah didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerja sama daripada dengan usaha sendiri atau persaingan.[[37]](#footnote-37)

Diskusi kerjasama internasional secara teori meliputi hubungan antar dua negara atau hubungan antar unti-unit yang lebih besar disebut juga dengan multilateralisme. Walaupun bentuk kerjasama seringkali dimulai diantara dua negara, namun fokus utama dari kerjasama internasional adalah kerjasama multilateral. Multilateralisme didefinisikan oleh **John Ruggie** sebagai bentuk institusional yang mengatur hubungan antara tiga atau lebih negara berdasarkan pada prinsip-prinsip perilaku yang berlaku umum yang dinyatakan dalam berbagai bentuk institusi didalamnya organisasi internasional, rezim internasional, dan fenomena yang belum nyata terjadi, yakni keteraturan internasional.[[38]](#footnote-38)

Pola kerjasama internasional sangat penting untuk mendukung kemajuan dan perkembangan suatu negara serta memelihara perdamaian dunia, maka sepanjang waktu, negara-negara saling bekerjasama dengan negara lainnya, seperti halnya, mereka menjalankan hubungan diplomatik, saling tukar menukar informasi mengenai teknologi dan ilmiah, membuka pintu untuk masuknya para investor, wisatawan manca negara dan lain sebagainya, dengan kata lain, para negara ini melakukan interaksi dengan norma timbal balik.[[39]](#footnote-39)

Dalam melaksanakan hubungannya, setiap negara memiliki politik luar negerinya masing-masing yang mengatur suatu negara dalam menjalankan hubungan luar negerinya dengan dunia internasional demi mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Adapun pengertian dari politik luar negeri adalah:

**“Politik luar negeri adalah kumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan-hubungan luar negerinya. Ia merupakan bagian dari kebijakan nasional dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdi kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, khususnya tujuan untuk suatu kurun waktu yang sedang dihadapi yang lazim disebut dengan kepentingan nasional. Pada hakekatnya ia merupakan suatu pola sikap atau respon terhadap lingkungan ekologinya. Respon tersebut mempunyai latar belakang yang berinteraksi dengan persepsi, pengalaman, kekayaan alam, serta kebudayaan politik yang biasanya dimanifestikan sebagai falsafah bangsa yang diakomodasikan dalam konstitusi.”[[40]](#footnote-40)**

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa politik luar negeri yang digunakan oleh Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya terhadap WMO didasarkan atas respon negara terhadap lingkungan ekologinya. Melihat bahwa kebutuhan akan informasi yang dapat diakses dengan mudah perihal cuaca dan iklim merupakan hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini, untuk memudahkan keberlangsungan kegiatan masyarakat Indonesia, serta adanya kesadaran untuk menjaga lingkungan dari bencana alam yang sangat mungkin terjadi dikarenakan keadaan alam yang sulit untuk diprediksi.

Menurut UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, politik luar negeri diartikan sebagai:

**“Kebijakan, sikap dan langkah pemerintah republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai kepentingan nasional.”[[41]](#footnote-41)**

Ketentuan tersebut menjadi dasar bagaimana kebijakan luar negeri harus tunduk kepada kepentingan nasional Indonesia dan dari situ pula diputuskan kebijakan-kebijakan mana yang akan dipilih oleh pemangku kepentingan. Hal ini kemudian ditegaskan kembali tentang pilihan diplomasi Indonesia dalam kancah internasional, yaitu bahwa kebijakan luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional.[[42]](#footnote-42)

Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksi kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa. Adapun wujud politik luar negeri Indonesia di era globalisasi adalah sebagai berikut[[43]](#footnote-43):

1. Arah kebijakan dalam pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional dijabarkan dalam program-program pembangunan.
2. Program peningkatan kerjasama internasional, dengan tujuan, memanfaatkan secara lebih optimal yang ada pada forum-forum kerjasama internasional terutama melalui kerjasama regional contohnya: ASEAN, dan kerjasama multilateral lainnya dan antara negara-negara yang memiliki kepentingan yang sejalan dengan Indonesia, seperti halnya WMO.

Prioritas politik luar negeri Indonesia dalam 5 tahun ke depan dituangkan dalam 3 program utama yaitu; program pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia, program peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan untuk memanfaatkan secara optimal berbagai potensi positif yang ada pada forum-forum kerjasama internasional dan program penegasan komitmen terhadap perdamaian dunia.[[44]](#footnote-44)

Sesuai dengan Keppres No. 64 tahun 1999, keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional diamanatkan untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran dan kemampuan keuangan negara.[[45]](#footnote-45)

Keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara politik: dapat mendukung proses demokratisasi, memperkokoh persatuan dan kesatuan, mendukung terciptanya kohesi sosial, meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan, mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik, mendorong penghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia.
2. Secara ekonomi dan keuangan: mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan,  meningkatkan daya saing, meningkatkan kemampuan iptek, meningkatkan kapasitas nasional dalam upaya pencapaian pembangunan nasional, mendorong peningkatan produktivitas nasional, mendatangkan bantuan teknis, *grant* dan bantuan lain yang tidak mengikat.
3. Secara sosial budaya: menciptakan saling pengertian antar bangsa, meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan, mendorong pelestarian budaya lokal dan nasional, mendorong upaya perlindungan dan hak-hak pekerja migran; menciptakan stabilitas nasional, regional dan internasional.
4. Secara segi kemanusiaan: mengembangkan *early warning system* di wilayah rawan bencana, meningkatkan *capacity building* di bidang penanganan bencana, membantu proses rekonstruksi dan rehabilitasi daerah bencana; mewujudkan citra positif Indonesia di masyarakat internasional, dan mendorong pelestarian lingkungan hidup dan mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup.[[46]](#footnote-46)

Dalam segi kemanusiaan, kerjasama antara Indonesia dengan WMO berjalan cukup baik, dalam rangka mengembangkan *early warning system*. Baru-baru ini Indonesia dengan WMO melakukan pertemuan dalam rangka mempersiapkan *Initial Meeting for Southestern Asia-Oceania Flash Flood Guidance* (SAOFFG) *Project* di Jakarta, membahas rencana pembentukan Pusat Regional Peringatan Dini kejadian Banjir Bandang. *Project* yang merupakan hasil kerjasama antara WMO, HRC, NOAA, USAID dan BMKG bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengurangan kerentanan wilayah terhadap bahaya hidrometeorologi, khususnya banjir bandang, dengan mengembangkan dan menerapkan sistem bimbingan banjir melalui peningkatan kapasitas regional dan nasional dengan sistem peringatan dini yang tepat dan akurat. WMO yang akan memberikan dukungan teknis berupa jasa pengawasan termasuk monitoringnya serta evaluasi.[[47]](#footnote-47)

Dalam menjalankan interaksi dengan negara-negara lain baik dalam tingkat regional maupun dalam level internasional, dibutuhkan suatu wadah atau sarana yang dapat menjadi tempat untuk mencapai atau mengejar tujuan bersama.

Upaya mendefinisikan suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan suatu negara dengan aktor-aktor non negara.[[48]](#footnote-48)

Sehingga dengan demikian organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan yang pembentukannya berdasarkan pada perjanjian antar anggota-anggotanya (pemerintah dan atau bukan pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mencapai tujuan bersama dari para anggotanya.[[49]](#footnote-49)

Adapun pengertian organisasi internasional menurut **Bowett D.W.** adalah sebagai berikut:

**“Mengartikan organisasi internasional sebagai organisasi permanen yang berdiri atas dasar adanya perjanjian internasional yang mayoritas berupa perjanjian multilateral dengan disertai tujuan.”[[50]](#footnote-50)**

Secara sederhana pengertian organisasi internasional mencakup unsur-unsur sebagai berikut[[51]](#footnote-51):

1. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama.
2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala.
3. Adanya staf yang bekerja sebagai “pegawai sipil internasional”.
4. Kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara.
5. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.
6. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
7. Mengerjakan fungsi secara berkesinambungan.

Seperti halnya dalam penelitian ini, unsur-unsur organisasi internasional yang salah satunya adalah mengadakan pertemuan-pertemuan secara berkala, maka Indonesia dan WMO pun rutin mengadakan pertemuan setiap 4 tahun sekali, pertemuan yang terakhir terjadi pada tahun 2014 dan akan digelar lagi pada tahun 2018. Pertemuan 4 tahunan sekali ini diadakan di Jakarta dengan agenda utama menitik beratkan pada pembahasan masalah-masalah yang bersifat teknis seperti diskusi tentang program prioritas WMO yang meliputi: pelayanan meteorologi penerbangan, hidrologi, WIGOS/WIS pelayanan klimatologi, GFCS dan pengurangan dampak bencana (*disaster risk reduction*). Di samping itu juga di bahas SOP Rencana Strategis WMO 2016-2019.[[52]](#footnote-52)

Pengertian dari SOP adalah sebagai berikut:

**“Standar operasional prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan *good governance*.”[[53]](#footnote-53)**

Selain itu, dalam kepentingan nasional, peran ‘negara’ sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang hidup di wilayah tersebut.

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. kepentingan ini dapat terlihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu ‘*power*’ yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara.[[54]](#footnote-54) Seperti yang dipaparkan oleh **Oppenheim** mengenai kepentingan nasional:

**“Kepentingan nasional juga didasari oleh motivasi-motivasi yang berpengaruh terhadap pembentukan kepentingan nasional. Motivasi dalam kepentingan internasional didasari oleh 4 hal, yaitu: individu, ideologi, organisasi, dan strategi yang disebut dengan *motivation maker*. Pada faktor organisasi, organisasi adalah suatu kelompok yang terdiri 2 atau lebih suatu golongan yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi ini kemudian berusaha mencapai tujuannya dengan melibatkan negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional dimana tujuan dan hasil keputusannya itu berpengaruh terhadap kebijakan dan kepentingan suatu negara.”[[55]](#footnote-55)**

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa organisasi tersebut merupakan wadah kerjasama dari kepentingan suatu negara dengan negara lain dalam artian perkelompok untuk mencapai kepentingan dan tujuan tertentu. Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral, semua itu kembali pada kebutuhan negara. hal ini didukung oleh suatu kebijakan yang sama halnya dengan yang dinyatakan oleh **T. May Rudy** bahwa kepentingan nasional merupakan:

**“Kepentingan nasional (*national interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Kepentingan nasional diidentikkan dengan ‘tujuan nasional’.”[[56]](#footnote-56)**

BMKG merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang menjalankan kebijaksanaan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia yang diwakilkan oleh BMKG menggandeng WMO untuk bekerja sama dalam hal meteorologi (cuaca dan iklim), hidrologi dan geofisika.[[57]](#footnote-57)

Kerjasama ini merupakan hal yang wajar karena munculnya kesadaran terhadap suatu masalah yang harus ditanggulangi bersama, serta kesadaran akan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Kerjasama ini pun tidak hanya sebatas membahas masalah pertukaran data maupun teknologi tetapi juga dalam hal pengurangan risiko bencana.

Adapun pengertian bencana menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia** yaitu:

**“Bencana mempunyai arti sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan. Sedangkan bencana alam artinya adalah bencana yang disebabkan oleh alam.”[[58]](#footnote-58)**

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian.[[59]](#footnote-59)

Jenis-jenis bencana menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, antara lain:

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
2. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.[[60]](#footnote-60)

Menanggapi banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia. Indonesia salah satunya bersama dengan WMO membangun pusat peringatan dini untuk banjir. Adapun pengertian banjir menurut **Haryono** adalah:

**“Genangan air atau banjir pada umumnya terjadi akibat adanya hujan lebat dengan durasi lama sehingga meningkatkan volume air dan mempercepat akumulasi aliran permukaan (*run off*) pada permukaan tanah.”[[61]](#footnote-61)**

Akhir-akhir ini banjir terjadi dimana-mana, hal ini terjadi disebabkan oleh intensitas dan frekuensi curah hujan yang meningkat. Sebagai upaya dari pemerintah yang diwakilkan oleh BMKG, maka BMKG dan WMO membentuk sistem peringatan dini. Adapun sistem peringatan dini menurut **Irianto** adalah:

**“Sistem peringatan dini tentang banjir dimaksudkan supaya masyarakat di daerah endemik banjir memperoleh informasi awal tentang besaran (*magnitude*) banjir yang mungkin terjadi serta waktu evakuasi korban sehingga resiko yang ditimbulkan dapat diminimalkan.”[[62]](#footnote-62)**

Sistem peringatan dini sangat penting, hal ini disebabkan karena:

1. Intensitas dan keragaman hujan menurut ruang dan waktu sangat tinggi sehingga bisa terjadi secara tiba-tiba atau yang dikenal dengan banjir kiriman/bandang (*flash flood*).
2. Curah hujan yang tinggi umumnya terjadi pada sore sampai malam hari akibat proses orografi, sehingga terjadinya debit puncak umumnya malam hari di saat masyarakat sedang tidur.[[63]](#footnote-63)

Ditambahkan, “Pemerintah Indonesia melalui BMKG berkomitmen akan terus fokus pada tujuan yang terukur dalam merangsang aktivitas kerjasama dan berperan aktif dan berinisiatif mengambil alih dalam penyelenggaraan kegiatan ini. dengan harapan besar bagi seluruh Anggota RA V yang berpartisipasi pada pertemuan penting ini dan kedepan dapat menghasilkan keputusan yang strategis dan konkret agar semakin relevan yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan pentingnya, landasan untuk memberi manfaat pada generasi mendatang,” pungkas Dr. Andi Eka Sakya M.Eng, selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan *President Regional Association V* (RA V).[[64]](#footnote-64)

Berdasarkan kerangka teoritis diatas, penulis membuat asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Indonesia memiliki peran penting dalam keanggotaanya pada WMO, terbukti dari terpilihnya Indonesia menjadi *President Regional Association V* (RA V) selama dua periode berturut-turut.
2. Kerjasama BMKG dan WMO berjalan dengan baik dibuktikan dengan diadakannya pertemuan pembahasan mengenai upaya pengurangan risiko bencana banjir di Indonesia.
3. BMKG bersama dengan WMO telah membentuk program CIFDP dan SAOFFG sebagai upaya pengurangan risiko bencana banjir di Indonesia.
4. **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mencoba menarik hipotesis sebagai berikut:

**“*Jika program CIFDP dan SAOFFG berjalan dengan baik, maka banjir di Indonesia akan lebih mudah untuk ditanggulangi.”***

1. **Operasional Variabel**

Untuk memperjelas hipotesis diatas dan mempermudah pengkajian lebih lanjut, maka penulis akan mengemukakan operasionalisasi variabel dan indikator, sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Operasionalisasi Variabel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis | Indikator  (Empirik) | Verifikasi  (Analisis) |
| Variabel Bebas :  Masalah penanggulangan bencana banjir di Indonesia | 1. Permasalahan dalam penanggulangan bencana. | 1. Kurangnya pemahaman terhadap karakteristik bahaya. 2. Sikap atau perilaku yang mengakibatkan menurunnya kualitas SDA. 3. Kurangnya informasi atau peringatan dini yang mengakibatkan ketidaksiapan. 4. Ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana. |
| Variabel Terikat :  Kerjasama BMKG dan WMO dalam membentuk sistem peringatan dini di Indonesia. | 1. Dalam hal penanganan bencana banjir. | 1. Indonesia menerima program asistensi dari WMO terkait *WMO Coastal Inundation Forecasting Demonstration Project* (CIFDP) untuk pembangunan sistem peringatan dini banjir rob di Indonesia. 2. Indonesia bersama dengan WMO membangun *Southeastern Asia-Oceania Flash Flood Guidance* (SAOFFG) *System*, yaitu sistem peringatan dini banjir bandang. |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

**Alur Pemikiran Kerjasama Indonesia dengan *World Meteorological Organization* (WMO)**

BMKG

Kepentingan Nasional RI

Politik Luar Negeri RI dan Isu Lingkungan Hidup

Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Indonesia

WMO

Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Indonesia

Kerjasama BMKG dan WMO dalam Pengurangan Risiko Banjir di indonesia

CIFDP-I

SAOFFG

1. **Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Metode Penelitian**

Adalah salah satu cara atau langkah yang diterapkan guna melakukan kajian terhadap masalah yang bertujuan untuk mencari cara pemecahan berdasarkan data yang dihimpun. Dalam penelitian ini digunakan:

1. Metode Penelitian Deskriptif Analisis. Metode deskriptif-analisis yaitu metode pemecahan masalah yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyusun data mengenai situasi yang sedang terjadi, kegiatan, pandangan, sikap yang nyata, pengaruh, kecenderungan yang nampak. Dimana pendekatan ini bertujuan menggambarkan, menganalisis, mengklarifikasi dan menginterpretasikan suatu peristiwa atau gejala berdasarkan pengamatan dan masalah aktual yang relevan, dalam masalah ini adalah menggambarkan dan menganalisis mengenai upaya BMKG dan WMO dalam pengurangan risiko bencana banjir di Indonesia.
2. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara terhadap narasumber yang dapat dipercaya kebenarannya, observasi langsung di lapangan, studi kepustakaan (*library research*) yakni meneliti dan mengumpulkan data, serta informasi dari berbagai bahan bacaan, baik dari buku, internet maupun dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Baik yang terdapat di perpustakaan maupun informasi dari internet.

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**

Penelitian dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan strata satu (S1), penulis melakukan beberapa penelitian pada institusi-institusi sebagai berikut:

* Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung.
* Badan Meteorologi, Klimatologi dan GeofisikaJl. Angkasa I No. 2 Kemayoran, Jakarta.

1. **Lamanya Penelitian**

Penelitian diperkirakan akan dilakukan kurang lebih satu semester atau 6 bulan, terhitung dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 yang mulai dari persiapan judul proposal penelitian, pencarian data dan pengolahan data.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Kegiatan | Waktu Kegiatan | | | | | |
| 2016-2017 | | | | | |
| Des-16 | Jan-17 | Feb-17 | Mar-  17 | Apr-17 | Mei-17 |
| 1. | Pra Penelitian dan Pengajuan Judul |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pengumpulan Data Awal |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Masa Bimbingan Awal |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Penyusunan Usulan Penelitian |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Seminar Usulan Penelitian |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Masa Penelitian dan Bimbingan |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Penyusunan Draft dan Perbaikan |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Sidang Sarjana |  |  |  |  |  |  |

1. **Sistematika Penulisan**

**BAB I Pendahuluan,** pada pendahuluan akan dijabarkan tentang latar belakang penelitian; identifikasi penelitian; pembatasan masalah; rumusan masalah; tujuan dan kegunaan penelitian; kerangka teoritis dan hipotesis; operasionalisasi variabel dan indikator; skema kerangka teoritis; tingkat analisis yang digunakan; metode penelitian; dan teknik pengumpulan data.

**BAB II,** bab ini akan mengulas objek penelitian variabel bebas. Dalam bab ini akan digambarkan tinjauan tentang sejarah BMKG dan WMO. Selanjutnya, kerjasama BMKG dan WMO melalui Keppres, serta menjelaskan kerjasama-kerjasama BMKG dan WMO tahun 2010-2016.

**BAB III,** bab ini akan mengulas objek penelitian variabel terikat. Bab ini diawali dengan penjelasan mengenai *early warning system* dan kesiapsiagaan. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan mengenai *disaster management* atau disebut juga dengan manajemen bencana. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

**BAB IV,** bab ini berisi verifikasi data di mana akan menjawab identifikasi serta rumusan masalah mengenai upaya pengurangan risiko bencana banjir di Indonesia yang dilakukan oleh badan pemerintah BMKG dibantu dengan WMO.

**BAB V,** bab simpulan akan memetakan keterkaitan antara kerjasama BMKG dan WMO dalam pengurangan risiko bencana banjir di Indonesia. Bab ini kemudian akan mengulas saran yang relevan dan membangun berdasarkan hasil penelitian skripsi ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. R. Jackson, & G. Sorensen, *Introduction to International Relations*, (Oxford University Press, 1999) [↑](#footnote-ref-1)
2. Barry Buzan, *People, State and Fear: The National Security Problem in International Relations*, (Great Britain: Wheatsheaf Books LTD, 1983), hlm. 2-3. [↑](#footnote-ref-2)
3. Barry Buzan, *Op. Cit*., hlm. 61. [↑](#footnote-ref-3)
4. Barry Buzan, *Op. Cit*., hlm. 19. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid [↑](#footnote-ref-5)
6. Greene Owen, *Environmental Issues*, in Jhon Baylis & Steve Smith (eds) *The Globalization of World Politics*, 2nd edition, Oxford, hlm. 387-414. [↑](#footnote-ref-6)
7. Robyn Eckersley, ‘*Green Theory*’ dalam Tim Dunne, Milja Kurki, dan Steve Smith. *International Relation Theorie*: second Edition, (New York: Oxford, 2010), hlm. 259. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid. [↑](#footnote-ref-8)
9. “Potensi Ancaman Bencana” dalam <http://www.bnpb.go.id/pengetahuan-bencana/potensi-ancaman-bencana> diakses pada tanggal 24 Agustus 2016. [↑](#footnote-ref-9)
10. “Jumlah Keseluruhan Kejadian Bencana Menurun Pada Tahun 2014” dalam <https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Final%20Indonesia%20Humanitarian%20Bulletin%20Apr-Jun%202014%20BHS.pdf> diakses pada tanggal 23 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid. [↑](#footnote-ref-11)
12. Walhi. [↑](#footnote-ref-12)
13. Bappenas, BNPB, UNDP, *Rencana Anggaran Nasional Pengurangan Risiko Bencana*, 2006. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid [↑](#footnote-ref-14)
15. “The World Meteorological Organization at a glance” dalam <https://www.wmo.int/pages/about/documents/WMO990.pdf> diakses pada tanggal 23 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid [↑](#footnote-ref-16)
17. Mumu Muhajir, *REDD di Indonesia: ke mana akan melangkah?*, 2010, hlm. 26. [↑](#footnote-ref-17)
18. BPPN, Rencana Aksi Nasional: Pengurangan Risiko Bencana, (Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional), 2006, hlm. 15-16. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibid, hlm. 35-36. [↑](#footnote-ref-19)
20. Teuku May Rudy, Study Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin,(Bandung: PT. Refika Aditama, 2002). [↑](#footnote-ref-20)
21. Wawancara dengan Anni Arumsari, Kepala Bagian Kerjasama BMKG, Jakarta, 20 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid. [↑](#footnote-ref-22)
23. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Kliminolodi dan Geofisika” dalam <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_31.pdf> diakses pada tanggal 23 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-23)
24. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Kliminolodi dan Geofisika” dalam <http://data.bmkg.go.id/share/dokumen/batang_tubuh_UU_MKG-nomor-31-tahun-2009.pdf> diakses pada tanggal 23 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-24)
25. “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framewrok Convention on Climate Change” dalam <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_6_1994.htm> diakses pada tanggal 23 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-25)
26. “Ketika Indonesia Jadi Malaikat Cuaca Dunia” dalam <http://indonesianreview.com/alfi-rahmadi/ketika-indonesia-jadi-malaikat-cuaca-dunia> diakses pada tanggal 23 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-26)
27. Wawancara dengan Anni Arumsari, Kepala Bagian Kerjasama BMKG, Jakarta, 20 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-27)
28. “Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana” dalam <http://www.bappenas.go.id/files/5113/5022/6066/versi-bahasa-indonesia__20081122175120__826__0.pdf> diakses pada tanggal 24 Desember 2016, hlm. 39. [↑](#footnote-ref-28)
29. “BNPB: Banjir Dominasi Bencana Nasional” dalam [http://bencana-kesehatan.net/index.php/13-berita/berita/1264-bnpb-banjir-dominasi-bencana-nasional#](http://bencana-kesehatan.net/index.php/13-berita/berita/1264-bnpb-banjir-dominasi-bencana-nasional) diakses pada tanggal 24 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibid. [↑](#footnote-ref-30)
31. “Para Ahli Meteorologi dan Hidrologi Berkumpul Membahas Sistem Peringatan Dini Bnjir Bandang” dalam <http://www.bmkg.go.id/berita/?p=para-ahli-meteorologi-dan-hidrologi-berkumpul-membahas-sistem-peringatan-dini-banjir-bandang&lang=ID> diakses pada tangga 24 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibid. [↑](#footnote-ref-32)
33. “Berita Negara Republik Indonesia” dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/BMKGBN675-2015.pdf> diakses pada tanggal 24 Desember 2016, hlm. 16. [↑](#footnote-ref-33)
34. K.J. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*, 1992, hlm. 200. [↑](#footnote-ref-34)
35. Dougherty & Pfaltzgraff, *Contending Theories*, (New York: Harper and Row Publisher, 1997), hlm. 418. [↑](#footnote-ref-35)
36. Ibid, hlm. 418-419. [↑](#footnote-ref-36)
37. Ibid, hlm. 419. [↑](#footnote-ref-37)
38. Ibid, hlm. 420. [↑](#footnote-ref-38)
39. Ibid [↑](#footnote-ref-39)
40. Sumpena Prawirasaputra, *Politik Luar Negeri Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 1985), hlm.2. [↑](#footnote-ref-40)
41. Pasal 1 ayat (2) UU No. 37, *Tentang Hubungan Luar Negeri*, 1999. [↑](#footnote-ref-41)
42. Ibid [↑](#footnote-ref-42)
43. Ibid [↑](#footnote-ref-43)
44. “Organisasi Internasional” dalam <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/organisasi-internasional.aspx> diakses pada tanggal 16 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-44)
45. Ibid [↑](#footnote-ref-45)
46. Ibid [↑](#footnote-ref-46)
47. “Para Ahli Meteorologi dan Hidrologi Berkumpul Membahas Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang” dalam <http://www.bmkg.go.id/berita/?p=para-ahli-meteorologi-dan-hidrologi-berkumpul-membahas-sistem-peringatan-dini-banjir-bandang&lang=ID> diakses pada tanggal 4 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-47)
48. Couloumbis & Wolfe, *An Introduction to International Relations: Power and Justice*, (Bandung: CV. Putra A Bardin, 1999), hlm. 276. [↑](#footnote-ref-48)
49. Clive Archer, *International Organization*, (London: Allen & Unwin Ltd, 2001), hlm. 35. [↑](#footnote-ref-49)
50. Bowett D.C., *The Law of International Institutions 4theds,* (London: Stevenson & Son Lmtd, 1982), hlm. 276. [↑](#footnote-ref-50)
51. Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr., *Organizing For Peace: International Organization In World Affair*, (New York: Houghton Miffin, 1967). [↑](#footnote-ref-51)
52. “BMKG Gelar Kegiatan The 16th Session of WMO RA V” dalam <http://www.siagaindonesia.com/1272/bmkg-gelar-kegiatan-the-16-th-session-of-wmo-ra-v.html> diakses pada tanggal 4 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-52)
53. “Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dalam <http://e-dokumen.kemenag.go.id/files/BX32jRZz1284857253.pdf> diakses pada tanggal 4 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-53)
54. P. Anthonius Sitepu, *Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 163. [↑](#footnote-ref-54)
55. Felix E. Oppenheim, “National Interest, Rationality, and Morality” Political Theory, 1987, hlm. 369-389. [↑](#footnote-ref-55)
56. T. May Rudy, *Study Strategis dalam Transformasi System Internasional Pasca Perang Dingin*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2002), hlm. 60. [↑](#footnote-ref-56)
57. “Fungsi, Tugas dan Kewenangan” dalam <https://www.weadapt.org/organisation/bmkg> diakses pada tanggal 10 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-57)
58. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006). [↑](#footnote-ref-58)
59. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana” dalam <http://bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf> diakses pada tanggal 10 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-59)
60. Op. Cit [↑](#footnote-ref-60)
61. M.S. Haryono, *Drainase Perkotaan*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1999). [↑](#footnote-ref-61)
62. G. Irianto, Sistem Peringatan Dini Banjir, (Bogor: Badan Litbang Pertanian, 2003). [↑](#footnote-ref-62)
63. Ibid. [↑](#footnote-ref-63)
64. “BMKG Gelar Kegiatan The 16th Session of WMO RA V” dalam <http://www.siagaindonesia.com/1272/bmkg-gelar-kegiatan-the-16-th-session-of-wmo-ra-v.html> diakses pada tanggal 4 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-64)